

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan pada pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat di ambil bahwa dalam keberadaan permukiman di kawasan sempadan sungai di kawasan garis sempadan sungai Gajah Wong belum sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010, keberadaan permukiman itu masih terletak di garis sempadan sungai Gajah Wong yang seharusnya tidak diperbolehkan ada bangunan diatasnya, hal tersebut terlampir dalam Lampiran II-10 Peraturan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.
2. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah terkait keberadaan permukiman di garis sempadan sungai Gajah Wong adalah dengan melakukan program pendaftaran tanah sistematika lengkap (PTSL), Program M3K serta adanya pendekatan FORSIDAS terhadap masyarakat sebagai salah satu organisasi yang menjawab permasalahan lingkungan dengan upayanya yaitu pengendalian masalah lingkungan. FORSIDAS berupaya memobilisasi masyarakat bantaran sungai Gajah Wong dengan berperan sebagai forum komunikasi yang mengupayakan perbaikan-perbaikan dari lingkungan maupun masalah sosial. FORSIDAS memiliki konsep perlindungan lingkungan dan pemberdayaan

lingkungan DAS Gajah Wong dengan kebijakan yang telah dibentuk bersama masyarakat dan instansi pemerintah.

## B. SARAN

1. Keberadaan permukiman di kawasan garis sempadan sungai memang membuat kawasan sungai menjadi tidak tertata dan membuat kawasan tersebut tampak kumuh, walaupun keberadaan permukiman itu telah ada sebelum adanya peraturan mengenai pelarangan permukiman di garis sempadan sungai Gajah Wong. Seharusnya permukiman tersebut perlu diperhatikan lebih baik oleh pemerintah agar masyarakat yang berada disekitar kawasan tersebut juga nyaman untuk tinggal di kawasan garis sempadan sungai Gajah Wong tersebut.
2. Mengenai tindak lanjut pemerintah terkait keberadaan permukiman di garis sempadan sungai Gajah Wong, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kondisi kawasan sungai tersebut dengan memaksimalkan program-program serta perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah permukiman yang berdiri di sepanjang garis sempadan sungai Gajah Wong dengan tetap memperhatikan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan garis sempadan sungai Gajah Wong

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus Maryono, 2018, *Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

Robinson Tarigan, 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi)*, Bumi Aksara, Jakarta

Husaini Usman, 2009, *Pengantar Statistika*, Bumi Aksara, Jakarta

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung

Dra. Taryati, dkk. 2011, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Daerah Rawan Ekologi*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, Yogyakarta.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Ussy Andawayanti, 2019, *Pengelolaan Daerah Sungai (DAS) Terintegrasi*, UB Press, Malang,

Hasil Penelitian :

Muhammad Singgih Prakoso, 2017, “*Pendirian Permukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yusra Hidayat Rasyid, 2017, “*Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Sempadan Sungai Jeneberang Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HassanuddinMakasa.

Charoline Koni Padaka, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Pantai Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011*”

*Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul*”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai  
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Jurnal :

Totok Dwinur Haryanto, Model Penatagunaan Tanah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, *Jurnal Penatagunaan Tanah*, Vol-VIII/No-02/Oktober/2009, Wacana Hukum.

Poni Sukaesih Kurniati, 2016, Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol-VI/NO-02/Desember/2016, JIPSi

Nowo Indriyatno, 2014, Peranan Keseimbangan Sumber Daya Air terhadap Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Keseimbangan Tata Air di Wilayah sub

DAS Gajah Wong, *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, Vol-10/No-1/Maret/2012, Biro Penerbit Planologi Undip

Internet :

Portal Pemerintah Kota Yogyakarta, <https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019, pukul 00.15 WIB

Kecamatan Umbulharjo, <https://umbulharjokec.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019, pukul 15.58

Repository Umy, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22611/H.%20BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2019, pada pukul 00.47 WIB

Digital Library, <http://digilib.unila.ac.id/31027/12/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, hlm. 21, diakses tanggal 25 Oktober 2019, pada pukul 07.15

Dspace UII, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10280/5.%20BAB%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019, pukul 8.29

Raden Ajeng Fauziah, 2015, "Peran Dan Upaya Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai (Forsidas) Dalam Menjaga Lingkungan Daerah Aliran Sungai Gajah Wong Yogyakarta" "di akses di [http://digilib.uin-suka.ac.id/19350/1/11720051\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/19350/1/11720051_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf), pada tanggal 25 Oktober 2019 pada pukul 09.45